

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pedagang Kaki Lima (PKL) seringkali menjadi obyek pengusuran. Diperkotaan, keberadaannya sering dianggap mengganggu ketertiban dan keindahan kota. Selain itu, pertumbuhan dan perkembangannya sering terlihat tidak teratur, nampak liar, kumuh, melebar dan ada yang menggunakan fasilitas umum untuk berdagang (misalnya saja di trotoar). Dengan adanya permasalahan kota tersebut membuat pemerintah kota berkeinginan untuk melakukan penertiban terhadap PKL seperti membongkar paksa tenda-tenda yang didirikan oleh PKL di jalanan, mengangkut paksa gerobak-gerobak PKL, serta seringpula terjadi aksi saling pukul antara petugas dan PKL dikarenakan PKL melakukan perlawanan terhadap petugas sehingga mengakibatkan jatuh korban. Dari sini sering muncul asumsi, bahwa PKL adalah sekumpulan pelaku usaha yang harus ditertibkan.

Menurut Akhirudin (1982), PKL adalah orang yang dengan modal relatif sedikit berusaha di bidang produksi dan berjualan barang-barang (jasa-jasa) untuk memenuhi kebutuhan kelompok konsumen tertentu di dalam masyarakat. Aktifitasnya dilaksanakan pada tempat-tempat yang sangat strategis dan dalam suasana lingkungan yang informal.

Sebenarnya apabila dilihat dari sisi positif, keberadaan PKL bagi masyarakat sebenarnya tidak dapat sepenuhnya dikatakan selalu menimbulkan dampak yang negatif. Hal ini karena pada dasarnya keberadaan PKL dapat pula

memberikan kontribusi yang cukup besar dalam aktivitas ekonomi masyarakat yang berada pada golongan lemah.

Dengan adanya keputusan pemerintah untuk menertibkan para PKL, membuat para PKL resah karena mereka merasa terancam akan kehilangan mata pencahariannya. Keresahan yang dirasakan oleh PKL pada akhirnya dapat membuat PKL melakukan aksi perlawanan kepada pemerintah.

Aksi perlawanan yang dilakukan oleh PKL ketika menghadapi adanya penggusuran telah diteliti oleh Alisjahbana (2005). Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman tentang (1) rasional tindakan perlawanan PKL, (2) proses terjadinya perlawanan PKL, (3) bentuk-bentuk perlawanan yang dilakukan PKL di Surabaya, serta (4) dampak yang diakibatkan oleh perlawanan yang dilakukan PKL. Penelitian ini mengambil lokasi jalan Tunjungan, Embong Malang, A. Yani, dan Praban Surabaya. Penelitian ini dilaksanakan mulai April 2003 hingga Maret 2004. Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data yaitu pengamatan, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan data dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: *Pertama*, faktor penyebab terjadinya perlawanan PKL adalah (1) adanya model penataan PKL yang *represif* bukan *persuasive*, (2) adanya sikap ketidakpedulian pemerintah kota terhadap keberadaan PKL, (3) suara PKL selalu terbungkam, (4) adanya stigma negatif terhadap keberadaan PKL, (5) berhembusnya era reformasi. *Kedua*, proses terjadinya perlawanan PKL pada dasarnya merupakan suatu proses panjang yang berjalan secara simultan mulai dari tahap pergerakan, tahap membangun kesadaran kolektif, membentuk organisasi gerakan, merapikan dan

merapatkan barisan, melakukan perlawanan, dan tahap konsolidasi yang meliputi membangun semangat pantang menyerah, dan melawan terus tanpa mengenal lelah. *Ketiga*, perlawanan yang dilakukan oleh PKL Surabaya pada dasarnya dapat dibedakan menjadi dua yaitu perlawanan secara tersembunyi dan perlawanan secara terang-terangan. Perlawanan secara tersembunyi, antara lain main kucing-kucingan dengan petugas, menyogok petugas, mencari tempat yang agak tersembunyi, membatasi jumlah PKL, membentuk paguyuban, mencari dukungan LSM, melawan dengan kekuatan modal. Adapun perlawanan secara terang-terangan meliputi melawan petugas saat ditertibkan, sengaja berjualan di tempat terlarang, melakukan demonstrasi, merayu pejabat, menolak relokasi. *Keempat*, baik penataan maupun perlawanan PKL, keduanya mempunyai dampak, baik bagi birokrasi pemerintah kota, PKL, maupun masyarakat secara umum. Dampak penataan bagi PKL, antara lain, PKL menjadi resah, pendapatan PKL menurun, bahkan sampai pada hilangnya mata pencaharian.

Penelitian mengenai aksi perlawanan PKL diatas menunjukkan bahwa telah ada sebuah upaya analisa terhadap fenomena penggusuran PKL dari sisi politis. Penelitian diatas mengkaji PKL sebagai suatu kekuatan ekonomi politik yang berhadap-hadapan dengan kekuasaan pemerintah kota. Namun demikian, fenomena penggusuran bukan hanya fenomena politis semata. Bagi individu-individu para PKL bukan tidak mungkin bahwa fenomena penggusuran akan diikuti dengan munculnya konsekuensi-konsekuensi psikologis tertentu. Inilah yang melatarbelakangi peneliti untuk mencoba melihat dimensi psikologis dari apa yang dialami oleh PKL mengenai ketidakpastian adanya penggusuran.

Kajian tentang konsekuensi psikologis dari ancaman hilangnya pekerjaan atau mata pencaharian seseorang telah diteliti didalam studi psikologi. Menurut Sarafino (1990: 120) seseorang akan mengalami stres, bila mereka berpikir bahwa pekerjaan itu ‘mengancam’, terlebih bagi mereka yang tidak mempunyai banyak peluang untuk bekerja di tempat lain. Mereka ini akan mempunyai penghargaan diri yang rendah dan tekanan darah yang tinggi. Menurut Schwarzer, Jerusalem, & Hahn, (1994) dalam Baron (2003: 237) dalam lingkungan kerja, stres sering kali bersumber dari hubungan interpersonal yang buruk, pekerjaan yang terlalu banyak, dan hilangnya pekerjaan. Stres berkorelasi pada kejadian yang dilematis yang tengah dialami misalnya saja masalah PHK, terancam kehilangan pekerjaan, dan sulit menemukan pekerjaan yang baru merupakan pencetus timbulnya stress berat dikalangan professional (Karir Astaga, Jumat 3 agustus 2001 “Dampak Stres Pada Pekerjaan”). Sedangkan menurut Pramadi dan Lasmono (2003: 326-340) dalam *Anima, Indonesian Psychological Journal* Vol. 18, No 4, sumber stres adalah ketidakpastian pada masa depan, yang berkaitan dengan kondisi ekonomi, dimana perubahan dalam daur bisnis menciptakan ketidakpastian ekonomis. Bila ekonomi itu mengerut, orang akan menjadi makin mencemaskan keamanan mereka. Selain faktor lingkungan, sumber stres kerja yang juga mendapat perhatian adalah pengaruh pengangguran (Taylor, 1991; O’Brien, 1998) dan pensiun (O’Brien, 1998). Sebagai contoh, ahli ekonomi kesehatan menaksir bahwa pada tahun 1976 di Amerika Serikat peningkatan pengangguran sebesar 1% berhubungan dengan peningkatan penyakit jantung yang mematikan dan sirosis hati sebesar 2%, dan bunuh diri 2-4%. Tidak mempunyai pekerjaan

berhubungan dengan tingginya kadar hormon stres (kadar *catecholamine*) dan ketidakberdayaan yang dipelajari (Van den Bergh, 1991, Robbins, S.P. 1996) dalam Smet (1999: 120-121).

Dari sejumlah penelitian diatas dapat disimpulkan bahwa hilangnya pekerjaan seseorang atau mata pencaharian akan diikuti dengan konsekuensi psikologis yang negatif yaitu stres. Dikaitkan dengan fenomena penggusuran PKL sangatlah mungkin bahwa para individu PKL yang terancam kehilangan pekerjaan atau mata pencaharian karena proses penggusuran akan juga mengalami stress yang sama.

Penelitian tentang dimensi psikologis dari fenomena hilangnya pekerjaan atau mata pencaharian seseorang selama ini cenderung dilakukan pada 2 area. Pertama, adalah mengidentifikasi dampak-dampak psikologisnya. Kedua adalah mengidentifikasi strategi atau cara yang dilakukan seseorang untuk mengatasi dampak negatif yang mereka alami akibat kehilangan pekerjaan. Dalam penelitian ini, peneliti memilih untuk memfokus pada area kedua yaitu mengidentifikasi cara-cara yang dikembangkan seseorang untuk mengatasi stressnya akibat terancam kehilangan pekerjaan. Usaha yang dilakukan individu-individu untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang sedang dialaminya juga telah banyak diteliti didalam studi psikologi, diantaranya adalah dengan penelitian-penelitian yang mengemukakan tema strategi *coping*. Dalam studi psikologi strategi *coping* secara sederhana dapat dipahami sebagai usaha individu untuk mengatasi permasalahan yang sedang dihadapinya.

Berikut adalah sejumlah penelitian yang telah dilakukan seputar tema strategi *coping*. Dari sejumlah penelitian tersebut terlihat bahwa penelitian-penelitian tentang strategi *coping* dalam studi psikologi cenderung difokuskan pada pengidentifikasian jenis strategi *coping* yang digunakan seseorang, yaitu *emotion focused coping* atau *problem focused coping*. Diantara penelitian-penelitian tersebut antara lain Muljo (2000) yang melakukan penelitian tentang strategi *coping* masyarakat Sikalang Bali. Tujuan penelitian ini adalah untuk melihat pengaruh budaya dan nilai-nilai agama terhadap strategi *coping* masyarakat Sikalang Bali dalam menghadapi masalah-masalah yang terkait dengan perubahan sendi-sendi kehidupan masyarakat akibat pengaruh budaya asing yang dibawa oleh bisnis pariwisata. Penelitian ini menggunakan data kualitatif dengan didukung data kuantitatif. Dari hasil data kualitatif ditunjukkan bahwa responden cenderung menggunakan strategi *emotion focused coping*. Demikian pula hasil dari angket menyatakan bahwa masyarakat Banjar Silakarang, Bali cenderung menggunakan *emotion focused coping*.

Selain itu juga terdapat penelitian yang dilakukan oleh Indah mengenai strategi *coping* pemilik toko terhadap keberadaan PKL di pasar Keputran Utara Surabaya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pemilik toko melakukan strategi *coping* dalam menghadapi keberadaan PKL yang berdagang di depan tokonya. Penelitian ini bersifat kualitatif studi kasus dengan membahas hasil-hasil wawancara mendalam dan observasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 2 subjek penelitian melakukan strategi *coping emotion focused coping* dan

satu subjek melakukan *problem focused coping* untuk menghadapi PKL yang berada di depan tokonya.

Mayoritas PKL yang berada di depan toko subjek adalah orang Madura. Stereotipe etnis Madura adalah licik, kasar, tidak jujur, ekstrovert, suka balas dendam, suka merampok, tempramen panas, mudah menghunuskan senjata tajam. Hal ini yang kemudian menimbulkan prejudis bagi para subjek yang menyebabkan subjek memiliki rasa takut terhadap PKL yang mayoritas adalah etnis Madura sehingga pemilik toko melakukan strategi *coping* tersebut.

Dari kedua penelitian, diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa penelitian seputar strategi *coping* apabila dikaitkan secara spesifik dengan fenomena yang dialami PKL yang mengalami ketidakpastian mengenai adanya pengusuran, maka sangatlah mungkin bahwa para individu PKL yang berada pada ketidakpastian yaitu terancam kehilangan pekerjaan atau mata pencaharian karena proses pengusuran juga akan mengembangkan strategi *coping*-strategi *coping* tertentu untuk mengatasi adanya permasalahan tersebut.

Penelitian mengenai reaksi perlawanan PKL merupakan salah satu hal yang memotivasi peneliti untuk mengetahui lebih lanjut mengenai bagaimana strategi *coping* PKL yang mengalami ketidakpastian mengenai adanya pengusuran. Peneliti akan melakukan penelitian pada PKL terancam mengalami pengusuran di kota Mojokerto. Pemilihan lokasi ini didasari adanya informasi yang melaporkan bahwa fenomena pengusuran PKL juga terjadi di kota kecil seperti kota Mojokerto (Radar Mojokerto, Selasa 10 Juli 2007, Satpol PP Tertibkan PKL). Jumlah PKL yang berada di kota Mojokerto cukup banyak,

diantaranya adalah PKL yang berada di kawasan Alun-alun, jalan Mojopahit Utara, jalan Mojopahit Selatan, jalan Bhayangkara, jalan Pahlawan, jalan Gajah Mada, jalan Pemuda, jalan Letkol Sumarjo, jalan Ahmad Yani, jalan Raden Wijaya, jalan Niaga dan termasuk diantaranya adalah PKL yang berada di kawasan jalan Joko Sambang. Lebih lanjut dilaporkan oleh sejumlah artikel dan hasil wawancara dengan responden PKL yang berada pada kawasan Joko Sambang akan segera mengalami penertiban oleh Pemerintah Kota Mojokerto seperti PKL di kawasan Mojokerto lainnya (Radar Mojokerto, 30 Mei 2007, “Pansus Soroti Penertiban PKL”).

Kawasan Joko Sambang sebenarnya adalah sebuah kompleks perumahan namun karena di sepanjang jalannya digunakan oleh sekelompok PKL untuk berdagang maka kawasan tersebut lebih dikenal sebagai kawasan Pasar sore Joko Sambang. Akibat dari keberadaan PKL di kawasan Joko Sambang, kawasan tersebut menjadi selalu terlihat padat, hal ini dikarenakan banyaknya masyarakat Mojokerto yang berdatangan untuk berbelanja barang kebutuhan mereka yang dijual oleh para PKL. Selain itu banyak pula para pengendara kendaraan yang hendak melewati kawasan Joko Sambang sehingga mengakibatkan lalu lintas di jalan Joko Sambang menjadi macet. Aktivitas jual beli PKL di jalan Joko Sambang terlihat padat akan para pembeli yaitu pada waktu sore hari antara pukul 17.00–22.00.



Foto1:
Suasana kemacetan di jalan joko sambang



Foto 2:
PKL mendirikan tenda-tenda di sepanjang jalan joko sambang

70 % PKL yang berada di jalan Joko Sumbang adalah para PKL yang mencari nafkah dengan cara berdagang berbagai jenis pakaian anak-anak dan pakaian orang dewasa, sedangkan 30 % dari mereka berjualan mainan anak-anak, sepatu, sandal, kaca mata dan *service* jam tangan. Para PKL tersebut berjualan dengan mendirikan tenda-tenda yang memenuhi sepanjang jalan Joko Sumbang. Jumlah PKL yang berjualan di Joko Sumbang adalah sekitar 40 PKL.



Foto 3 :
Salah satu kios penjual baju orang dewasa



Foto 4:
Salah satu kios penjual baju anak-anak



Foto 5:
Salah satu kios penjual kaca mata dan jam tangan

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti pada hari Minggu, 2 September 2007 dengan salah satu PKL Joko Sambang, diketahui bahwa alasan pemerintah kota untuk melakukan penertiban dengan cara penggusuran terhadap sebagian PKL di wilayah Joko Sambang adalah pemerintah kota Mojokerto ingin melakukan penertiban terhadap PKL di Joko Sambang dan ingin melakukan pelebaran jalan dikawasan Joko Sambang. Sebenarnya jalan Joko Sambang tersebut pada awalnya adalah dua arah sekarang hanya menjadi satu arah karena adanya kemacetan yang sering terjadi. Hal ini juga diperkuat dengan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti dikawasan Joko Sambang dan data berupa foto yang diperoleh peneliti dikawasan Joko Sambang, bahwa memang kawasan tersebut terlihat macet dikarenakan banyak dari para pengunjung berdatangan dikawasan tersebut untuk berbelanja.

Penertiban yang akan segera dilakukan oleh pemerintah kota terhadap PKL membuat PKL menjadi resah karena mereka merasa akan kehilangan tempat untuk berdagang (Radar Mojokerto, Senin, 27 Agustus 2007, “PKL Asongan Resah”). Situasi dimana PKL merasa resah menunjukkan bahwa apabila

keresahan tersebut berlangsung terus menerus bukan tidak mungkin bahwa para PKL tersebut akan mengalami stress. Stress berkepanjangan akan menyebabkan ketegangan dan kekuatiran yang terus-menerus. Stress berkepanjangan ini biasa disebut stress kronis. Stress kronis sifatnya menggerogoti dan menghancurkan tubuh, pikiran dan seluruh kehidupan penderitanya secara perlahan-lahan. Stress kronis umumnya terjadi di seputar masalah kemiskinan, kekacauan keluarga, terjebak dalam perkawinan yang tidak bahagia, atau masalah ketidakpuasan kerja. Akibatnya, orang akan terus-menerus merasa tertekan dan kehilangan harapan (dalam “Stress Kerja” Oleh Rini, 2006).

Pada saat peneliti menyebarkan angket untuk melakukan wawancara awal dengan 6 responden PKL Joko Sambang pada hari Sabtu, 12 April 2008, sebagian besar responden mengatakan bahwa ia tidak dapat menerima begitu saja keputusan dari pemerintah kota Mojokerto yang ingin melakukan penertiban terhadap dirinya yang sudah cukup lama berprofesi sebagai PKL (sekitar 10-20) tahun. Responden merasa akan kehilangan mata pencaharian hidupnya karena responden sudah merasa nyaman berdagang di Joko Sambang. Selain itu responden juga merasa tidak adil dengan keputusan pemerintah yang melakukan penggusuran pada PKL yang berada di Joko Sambang saja dengan alasan untuk pelebaran jalan. Keinginan dari PKL untuk tetap mempertahankan tempat dagangnya dapat dikatakan wajar terjadi karena dari hasil penelitian *survey* di lapangan yang dilakukan oleh Obeng Nur pada tahun 2004, menyatakan bahwa sebagian PKL sudah merasa nyaman dengan kondisi tempat berjualan (71,0%) karena PKL sudah menempati kawasan tersebut lebih dari 5 tahun. Bahkan

beberapa pedagang mengaku sudah lebih dari 10 tahun berada, sehingga para PKL berharap kondisi ini tidak berubah (dalam Fahima, edisi 8, Rabu, 30 Juni 2004, “Memposisikan PKL di kota Cirebon”, hal 12, para 7).

Alasan dari PKL Joko Sambang untuk tetap mempertahankan tempat berdagang ini sejalan dengan adanya penelitian yang dilakukan oleh Herdianto (2006: 101) mengenai strategi bertahan masyarakat kelas menengah bawah pada sekelompok PKL di sekitar pasar Wonokromo. Dari hasil penelitian ini didapatkan bahwa penyebab bertahannya PKL berdagang di sekitar pasar Wonokromo (meskipun mereka tahu hal tersebut menyalahi aturan) adalah dengan berdagang bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari. Banyaknya pelanggan membuat mereka merasa sayang jika pindah ke tempat lain, apalagi jika tempat pengganti tersebut kurang menjanjikan seperti daerah asal dalam masalah pekerjaan dan pemenuhan penghasilan. Rendahnya pendidikan dan kurangnya keahlian yang dikuasai juga membuat PKL enggan berganti profesi. Strategi yang digunakan PKL untuk tetap bertahan berdagang di sekitar pasar Wonokromo adalah dengan cara menggelar dagangan bila keadaan aman dari penertiban yang dilakukan oleh pemerintah.

Keputusan pemerintah kota Mojokerto untuk segera melakukan penertiban terhadap PKL di Joko Sambang, membuat PKL menjadi merasa kesulitan untuk mencari nafkah apabila nantinya harus berpindah tempat untuk berdagang. Dari kondisi tersebut dapat menunjukkan bahwa PKL mengalami stres. Hal ini mungkin terjadi karena menurut Suprpti (1998: 35) Stres adalah suatu keadaan

dimana beban yang dirasakan tidak sepadan dengan kemampuan untuk mengatasi beban itu.

Dari kondisi tersebut dapat menunjukkan bahwa PKL sebagai golongan yang lemah tidak memiliki kekuatan yang cukup untuk melawan keputusan dari pemerintah kota yang berkeinginan untuk melakukan penggusuran.

Permasalahan diataslah yang melatarbelakangi peneliti untuk melakukan penelitian mengenai bagaimana strategi *coping* yang dilakukan PKL di Joko Sambang dalam menghadapi ketidakpastian terkait dengan adanya ancaman penggusuran.

1.2. Fokus Penelitian

Peneliti memfokuskan pada strategi *coping* PKL yang mengalami ketidakpastian akibat adanya informasi penggusuran. Penelitian ini akan dilakukan di kota Mojokerto yaitu di jalan Joko Sambang. Hal ini dikarenakan informan tinggal di kota Mojokerto. Alasan pemilihan lokasi PKL di jalan Joko Sambang kota Mojokerto, karena pemilihan lokasi ini didasari adanya data berupa artikel dan hasil wawancara dengan PKL, yang menunjukkan bahwa sebagian dari PKL yang berada di kota Mojokerto sudah dilakukan penertiban. Sedangkan PKL yang berada pada wilayah Joko Sambang akan segera dilakukan penertiban oleh pemerintah kota Mojokerto dengan alasan untuk pelebaran jalan.

Kriteria PKL yang akan menjadi subjek penelitian dalam penelitian ini adalah:

- a) PKL yang melakukan aktivitas dagangnya di jalan Joko Sambang

- b) PKL yang sudah lama (kurang lebih 10 tahun) melakukan aktivitas dagangnya di jalan Joko Sambang
- c) PKL yang mengetahui informasi mengenai adanya penggusuran
- d) PKL yang mengalami ketidakpastian mengenai adanya penggusuran

Alasan peneliti memilih memfokuskan penelitian pada strategi *coping*, karena peneliti ingin melihat bagaimana kemampuan strategi *coping* yang digunakan oleh PKL Joko Sambang, cenderung pada jenis *problem focused coping* atau *emotion focused coping* atau kedua jenis strategi *coping* tersebut. Dari hasil angket wawancara yang dilakukan peneliti pada hari Sabtu, 12 April 2008 dengan 6 responden PKL Joko Sambang, peneliti mendapatkan kesimpulan bahwa responden merasa resah dikarenakan informasi mengenai ketidakpastian adanya penggusuran sehingga membuat responden berkeinginan untuk mempertahankan tempat untuk berdagang, walaupun responden sendiri mengetahui bahwa dirinya sedang berada pada ketidakpastian untuk dapat mempertahankan tempat berdagangnya di kawasan Joko Sambang.

Hal inilah yang kemudian membuat peneliti berkeinginan untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai strategi *coping* dari PKL yang mengalami ketidakpastian mengenai adanya informasi penggusuran.

1.3. Pertanyaan Seputar Fenomena Khusus

Penelitian strategi *coping* PKL yang mengalami ketidakpastian mengenai adanya informasi penggusuran adalah untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan

seputar strategi *coping* PKL yang selama ini dilakukan untuk mengatasi adanya ketidakpastian adanya penggusuran. Pertanyaan-pertanyaan tersebut adalah:

- a. Bagaimana dampak adanya informasi penggusuran terhadap kondisi psikologis para PKL?
- b. Bagaimana strategi *coping* yang dilakukan PKL untuk mengatasi permasalahan ketidakpastian adanya informasi penggusuran?

1.4. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana dampak mengenai adanya informasi penggusuran terhadap kehidupan sosial responden (PKL)
2. Untuk mengeksplorasi strategi *coping* PKL yang mengalami ketidakpastian mengenai adanya informasi penggusuran.

1.5. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian dengan judul “strategi *coping* PKL yang mengalami ketidakpastian mengenai adanya penggusuran” diharapkan dapat memberi manfaat, antara lain :

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini dapat memberikan masukan bagi psikologi sosial mengenai bagaimana seorang individu bersama dengan kelompoknya mampu menghadapi permasalahan yang sedang dialaminya dengan cara melakukan strategi *coping*.

Untuk itu peneliti melakukan penelitian tentang “Kemampuan Strategi *Coping* PKL yang mengalami ketidakpastian mengenai adanya Informasi Penggusuran”.

2. Secara Praktis

a. Bagi responden:

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan pada responden, agar responden mampu memahami kondisi yang mungkin akan dialaminya (mengetahui ketidakpastian adanya penggusuran). Selain itu penelitian ini juga dapat memberikan manfaat kepada responden agar kelak responden dapat melakukan strategi *coping* yang tepat ketika menghadapi permasalahan lain yang mungkin kelak akan dialami.

b. Bagi masyarakat:

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan masukan bagi masyarakat yang juga berprofesi sebagai PKL apabila mereka mengalami permasalahan yang sama dengan PKL Joko Sambang yaitu akan mengalami penggusuran. Diharapkan penelitian ini dapat memberi informasi bagi mereka tentang bentuk-bentuk strategi *coping* yang dapat dilakukan ketika PKL akan mengalami penggusuran.

c. Bagi pemerintah daerah:

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemerintah daerah mengenai kondisi yang mungkin akan dialami PKL apabila penggusuran terjadi. Sehingga pemerintah dapat mulai mencoba melakukan

pendekatan kepada PKL untuk berdiskusi mengenai permasalahan adanya informasi penggusuran.